



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**

**JL. PULAU SERAM NO. 291
LUWUK SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Seram Nomor 291, Telp. (0461) 21073 Fax. 324579
LWUK SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 800 / 46.a / DPMD

T E N T A N G

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dapat terarah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c, maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari KKN;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

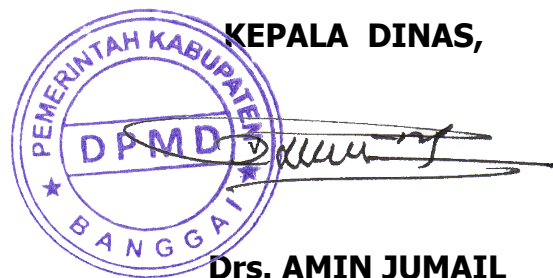
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai bahan acuan perencanaan tahunan dinas.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 9 Maret 2019

KEPALA DINAS,


Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan).
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai di Luwuk.



KATA PENGANTAR

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang dimaksud Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banggai disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banggai 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas ini dimaksud sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

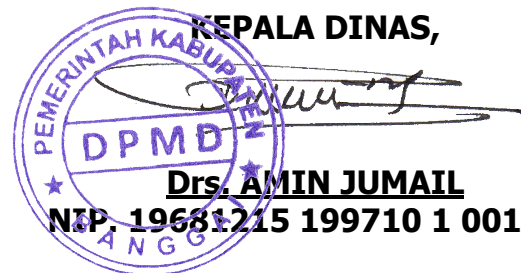
Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan arah, tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan guna lebih bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program, sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada petunjuk yang ada, tetapi disadari masih ada kekurangan dalam berbagai hal, namun diharapkan batas minimal telah ada rencana kerja yang dapat dipakai sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Saran dan koreksi untuk perbaikan senantiasa tetap diharapkan dan atasnya diucapkan terimakasih.

Luwuk, 9 Maret 2019

KEPALA DINAS,



Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Visi dan Misi	3
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI TAHUN LALU	
A. Kondisi Kinerja Pelayanan Dinas	6
B. Permasalahan Pelayanan Dinas.....	11
C. Kerangka Anggaran (Program dan Kegiatan yang terealisasi dan tidak Terealisasi tahun lalu	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
A. Tujuan dan Sasaran Dinas.....	14
B. Program dan Kegiatan Dinas	14
C. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas.....	18
BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	26
A. Dana indikatif	26
B. Sumber Dana Yang dibutuhkan	26
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	



Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Dalam menyusun Rencana Kerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun untuk lima tahun dan RPJMD.

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja - PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Didalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai memuat ; Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun rencana yaitu tahun 2020.

Dokumen Renja akan dibahas pada Forum SKPD, dengan membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ` Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua



- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah untuk mengarahkan perwujudan Visi dengan mengemban Misi Dinas, melakukan terobosan strategis yang dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah khususnya dalam lingkup kewenangan Dinas.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai adalah ;

1. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam suatu indikasi program dan kegiatan strategis mendukung pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai bidang kewenangan.
2. Mengidentifikasi program dan kegiatan strategis sehingga memudahkan dalam menetapkan prioritas serta langkah – langkah pelaksanaannya.
3. Menyediakan suatu Rencana Kerja yang dapat dijadikan acuan pengelolaan tugas Dinas, secara efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan yang semakin kompleks.
4. Untuk pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama tahun 2020 sesuai Renstra RPJMD.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, visi dan misi maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dengan lebih spesifik dan terukur, dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Pada bab ini disampaikan pula uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI TAHUN LALU

Pada tahun lalu telah dilaksanakan program dan kegiatan oleh masing – masing Bidang dengan pencapaian antara lain :

1. Sekretariat

- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Terlaksananya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat Daerah;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

- Terlaksananya Fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan desa;
- Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi, pembinaan dan penetapan tapal batas desa;
- Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, pemutahiran, monitoring, evaluasi dan pelaporan data profil desa dan profil kelurahan;
- Terselenggaranya lomba desa;
- Terlaksananya evaluasi perkembangan desa/kelurahan.



3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Tim fasilitator APBDesa tingkat Kecamatan dan Pendamping profesional desa;
- Terlaksananya Peningkatan transparansi didalam pengelolaan APBDesa melalui APBDesa berbasis web;
- Terlaksananya peningkatan kapasitas Kepala desa/perangkat desa/BPD melalui penyuluhan dan penerangan hukum didalam pengelolaan keuangan desa;
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan administrasi keuangan desa;
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- Terlaksananya asistensi APBDesa tingkat kabupaten;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan APBDesa;
- Terlaksananya identifikasi, fasilitasi, pembentukan dan pembinaan kerjasama antar desa.

4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
- Terlaksananya bimbingan teknis kader desa dan masyarakat desa;
- Terlaksananya BBGRM;
- Terlaksananya Jambore PKK;
- Terlaksananya dukungan dana operasional PKK kecamatan dan kelurahan;
- Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan sistem informasi pokjnal posyandu;
- Terlaksananya Rakon PKK;
- Terlaksananya identifikasi, fasilitasi, pembentukan, penetapan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga kemasyarakatan desa.



5. Bidang Pemberdayaan Desa

- Terlaksananya fasilitasi pembentukan BUMDes dan BUMADEs;
- Terlaksananya sosialisasi produk hukum terkait dengan BUMDes, pasar desa/lembaga ekonomi produktif perdesaan/kawasan perdesaan;
- Terlaksananya PAMSIMAS;
- Terlaksananya PPSP;
- Terlaksananya pembentukan Posyantek tingkat kecamatan;
- Terlaksananya identifikasi, pembinaan, pemasyarakatan, pemanfaatan dan pembangunan TTG berbasis masyarakat;
- Terlaksananya identifikasi, perencanaan, penetapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan pedesaan.

A. Permasalahan Pelayanan Dinas

Permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Secara alamiah permasalahan yang ada di pengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Permasalahan internal bersumber pada adanya kelemahan dalam ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemberian pelayanan sesuai dengan yang di harapkan.

❖ Faktor Internal .

1. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
2. Rendahnya kompetensi ASN yang berkaitan dengan Tupoksi.
3. Terbatasnya Anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.



❖ **Faktor Eksternal.**

1. Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Rendahnya Kinerja kelembagaan masyarakat.
4. Rendahnya kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat
5. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna .
6. Rendahnya pemanfaatan potensi dan sumber daya desa.
7. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.
8. Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang terbatas.
9. Rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintahan desa.

B. Kerangka Anggaran (Program dan Kegiatan yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi Tahun Lalu)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun lalu dengan total anggaran sebesar **Rp. 11.055.728.718,-** jumlah belanja langsung **Rp. 6.022.714.652,-** belanja tidak langsung **Rp. 5.033.014.066,-** yang melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut ;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang terdiri dari 13 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.028.589.582,-** realisasi sebesar **Rp. 1.007.423.219,- (97,94 %)**
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** yang terdiri dari 6 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 250.927.800,-** realisasi sebesar **Rp. 250.927.800,- (99,91 %)**
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** 2 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 154.755.000,-** realisasi sebesar **Rp. 154.755.000,- (100 %)**
- d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS** 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.9.925.000,-** realisasi sebesar **Rp.9.925.000,- (100 %)**



- e. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** 2 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 23.454.500,-** realisasi sebesar **Rp. 23.357.700,- (99,59 %)**
- f. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** yang terdiri dari 6 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 88.958.795,-** realisasi sebesar **Rp.88.208.900 (99,16 %)**
- g. **Program Pengembangan Sistem Informasi/Data** 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 57.904.925,-** realisasi sebesar **Rp. 57.759.000,- (99,75 %)**
- h. **Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan** 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 63.916.050,-** realisasi sebesar **Rp. 63.838.000,- (99,88 %)**
- i. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** yang terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 544.190.000,-** realisasi sebesar **Rp. 537.095.760,- (98,70 %)**
- j. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan** yang terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 119.600.000,-** realisasi sebesar **Rp. 119.587.000,- (99,99 %)**
- k. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** yang terdiri dari 9 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.308.420.000,-** realisasi sebesar **Rp. 1.301.505.856,- (99,47 %)**
- l. **Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan** yang terdiri dari 4 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.111.958.000,-** realisasi sebesar **Rp. 1.094.362.473,- (98,42 %)**
- m. **Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju Keunggulan kompetitif Dalam Persaingan Lokal, regional dan Global** 4 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 329.224.000,-** realisasi sebesar **Rp. 323.721.600 (98,33 %)**
- n. **Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa** y 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 43.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 42.938.800,- (99,86 %)**



- o. **Program Penataan dan Perencanaan Desa** 7 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.887.891.000,-** realisasi sebesar **Rp.887.177.016,- (99,92 %)**.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai telah ditentukan sebanyak 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran dengan Renstra Dinas yaitu :

✚ Tujuan Dinas :

1. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa;

✚ Sasaran Dinas :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
3. Meningkatnya keberdayaan lembaga perekonomian desa;
4. Meningkatnya Pengembangan Sumber daya desa;

B. Program dan Kegiatan Dinas

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai, maka disusun rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor



- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- l. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- n. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- o. Pengadaan peralatan gedung kantor
- p. Pengadaan Meubelair
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- u. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- v. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- w. Pengadaan pakaian KORPRI
- x. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- y. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- z. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- aa. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- bb. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- cc. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
- dd. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- ee. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD
- ff. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
- gg. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
- hh. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan



2. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

- a. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa
- b. Fasilitasi Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal batas Desa.
- c. Fasilitasi, Pembinaan, Pemutahiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
- d. Penyelenggaraan Lomba Desa
- e. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa
- c. Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa berbasis Web
- d. Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten
- e. Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa
- f. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa

4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- b. Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa
- c. Penyelenggaraan BBGRM
- d. Jambore PKK
- e. Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan Dan Kelurahan
- f. Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu
- g. Rakon PKK
- h. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa



5. Bidang Pemberdayaan Desa

- a. Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
- b. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/Kawasan Perdesaan
- c. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)
- d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- e. Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan
- f. Identifikasi, Pembinaan, Pemasarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat
- g. Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan

C. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas

Seluruh kegiatan yang disusun oleh dinas telah di tentukan indikator kinerjanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja setiap kegiatan adalah sebagai berikut ;

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja **Jumlah materai;**
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja **Jumlah jaringan telepon, air dan listrik;**
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja **Jumlah pengurusan STNK roda 4 dan roda 2;**
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator kinerja **Jumlah tenaga kebersihan, alat kebersihan dan bahan pembersih;**
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan indikator kinerja **Jumlah alat tulis kantor;**



6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja ***Jumlah penggandaan;***
7. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja ***Jumlah komponen instalasi listrik;***
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja ***Jumlah surat kabar;***
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan indikator kinerja ***Jumlah makanan dan minuman;***
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah dengan indikator kinerja ***Jumlah perjalanan dinas luar daerah;***
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dengan indikator kinerja ***Jumlah perjalanan dinas dalam daerah;***
12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja ***Jumlah tenaga honorer;***
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja ***Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional;***
14. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dengan indikator kinerja ***Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor;***
15. Pengadaan Peralatan gedung kantor dengan indikator kinerja ***Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor;***
16. Pengadaan Meubelair dengan indikator kinerja ***Jumlah pengadaan meubelair ;***
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan indikator kinerja ***Jumlah pemeliharaan gedung kantor;***
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja ***Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;***
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan indikator kinerja ***Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara;***
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor indikator kinerja ***Jumlah peralatan kantor yang dipelihara;***



21. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor indikator kinerja ***Jumlah rehabilitasi gedung kantor;***
22. Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta Perlengkapannya indikator kinerja ***Jumlah pengadaan pakaian dinas;***
23. Pengadaan pakaian KORPRI indikator kinerja ***Jumlah pengadaan pakaian KORPRI;***
24. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu indikator kinerja ***Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;***
25. Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan indikator kinerja ***Jumlah pegawai purna tugas;***
26. Pendidikan dan Pelatihan Formal indikator kinerja ***Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat formal;***
27. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur indikator kinerja ***Jumlah laporan kepegawaian;***
28. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja ***Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;***
29. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dengan indikator kinerja ***Jumlah laporan keuangan semesteran;***
30. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator kinerja ***Jumlah laporan keuangan akhir tahun;***
31. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD dengan indikator kinerja ***Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD;***
32. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah dengan indikator kinerja ***Jumlah dokumen RKBU perangkat daerah;***
33. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) dengan indikator kinerja ***Jumlah laporan inventarisasi aset pemerintah Kabupaten Banggai (OPD);***
34. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan indikator Kinerja terlaksananya ***Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD;***



35. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa indikator kinerja ***Jumlah laporan rencana kerja Pemerintahan Desa di 291 Desa;***
36. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa indikator kinerja ***Jumlah laporan penyelesaian dan penetapan tapal batas desa;***
37. Fasilitasi, pembinaan, pemutahiran, monitoring, evaluasi dan pelaporan data profil desa dan profil kelurahan indikator kinerja ***Jumlah laporan klasifikasi desa dan kelurahan di 291 desa dan 46 kelurahan;***
38. Penyelenggaraan Lomba desa indikator kinerja ***Jumlah laporan penyelenggaraan lomba desa di 23 desa dan 10 kelurahan serta mengikuti lomba desa dan kelurahan ditingkat propinsi dan tingkat pusat;***
39. Evaluasi perkembangan desa/kelurahan indikator kinerja ***Jumlah laporan instrumen pengungkap data kategori desa dan kelurahan;***
40. Peningkatan kapasitas melalui pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar bagi kepala desa/perangkat desa dan BPD indikator kinerja ***Jumlah peserta pembinaan bagi kepala desa / perangkat desa dan BPD;***
41. Pembinaan dan fasilitasi tim fasilitator APBDesa tingkat kecamatan dan pendamping profesional desa indikator kinerja ***Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan bagi Tim evaluasi APBDesa tingkat kecamatan dan pendamping profesional desa;***
42. Peningkatan transparansi didalam pengeloan APBDesa melalui APBDesa berbasis web indikator kinerja ***Jumlah laporan realisasi APBDesa;***
43. Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten indikator kinerja ***Jumlah kecamatan yang dilakukan supervisi evaluasi APBDesa;***
44. Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa indikator kinerja ***Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan APBDesa;***
45. Identifikasi, fasilitasi, pembentukan dan pembinaan kerjasama antar desa indikator kinerja ***Jumlah dokumen Identifikasi kerjasama antar desa;***



46. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan indikator kinerja ***Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan perdesaan yang mengikuti sosialisasi/pembinaan;***
47. Penyelenggaraan bimbingan teknis kader desa dan masyarakat desa indikator kinerja ***Jumlah peserta bimbingan teknis kader desa dan masyarakat desa;***
48. Penyelenggaraan BBGRM indikator kinerja ***Jumlah pelaksanaan BBGRM tingkat kabupaten, propinsi dan nasional;***
49. Jambore PKK indikator kinerja ***Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TP-PKK Kab. Banggai;***
50. Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan Dan Kelurahan indikator kinerja ***Jumlah PKK kecamatan dan kelurahan yang diberikan dukungan dana operasional;***
51. Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjnal Posyandu indikator kinerja ***Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan sistem informasi pokjnal posyandu;***
52. Rakon PKK indikator kinerja ***Jumlah peserta yang mengikuti Rakon PKK;***
53. Identifikasi, fasilitasi, pembentukan, penetapan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga kemasyarakatan desa indikator kinerja ***Jumlah dokumen database lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;***
54. Fasilitasi pembentukan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa indikator kinerja ***Jumlah laporan evaluasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa;***
55. Penyusunan,, penetapan dan sosialisasi produk hukum terkait dengan BUMDesa, pasar desa/lembaga ekonomi produktif perdesaan/kawasan perdesaan indikator kinerja ***Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Permendes tentang BUMDesa;***



56. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) indikator kinerja ***Jumlah peserta sosialisasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas);***
57. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) indikator kinerja ***Jumlah peserta sosialisasi PPSP;***
58. Fasilitasi, pembentukan, penetapan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Posyantek tingkat kecamatan indikator kinerja ***Jumlah pelaksanaan pembentukan Posyantek tingkat Kecamatan;***
59. Identifikasi, pembinaan, pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna berbasis masyarakat indikator kinerja ***Jumlah pelaksanaan pameran TTG ;***
60. Identifikasi, perencanaan, penetapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan pedesaan indikator kinerja ***Jumlah dokumen kawasan pedesaan.***



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Dana Indikatif

Dalam penyusunan Renja ini termasuk didalamnya adalah menentukan dana. Dana indikatif yang disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan dinas sebesar Rp. 6.129.502.835,- . Dengan rincian seperti pada lampiran.

B. Sumber Dana Yang Dibutuhkan

Untuk Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya membutuhkan dana dengan rincian sumber dana seperti pada lampiran yaitu ;

- APBD II sebesar: Rp. 6.129.502.835,-
- APBN sebesar : Rp. 4.850.000.000,-



BAB V PENUTUP

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dapat berjalan lancar, namun apabila dilihat dari sisi ketersediaan dana untuk mendukung program dan kegiatan tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini karena kendala yang dihadapi dinas cukup berat.

Untuk itu harapannya adalah :

1. Perlu di alokasikan dana dekosentrasi maupun dana tugas pembantuan atau dana APBN lainnya untuk mendukung dana APBD yang masih terbatas. Konsekuensi dari hal ini adalah perlu di tingkatkan penyediaan dana APBD pada kegiatan rapat – rapat koordinasi keluar daerah baik ke propinsi maupun ke pusat, dengan harapan bisa mendapatkan dana propinsi maupun pusat.
2. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, aparat dinas perlu di ikutsertakan kursus maupun diklat teknis yang diselenggarakan oleh pusat maupun propinsi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai disusun agar visi dan misi dinas dapat di capai dengan baik sesuai harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BANGGAI**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran			1,111,898,547			1,507,127,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000	Luwuk	1200 Lbr	7,200,000	APBD	-	9,000,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik	Luwuk	1 Jaringan	56,000,000	APBD	-	56,000,000
		Jumlah Jaringan Air		1 Jaringan	3,000,000			3,000,000
		Jumlah Jaringan Telepon		1 Jaringan	30,000,000			30,000,000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan STNK roda 4		4 unit	9,900,000			11,000,000
		Jumlah pengurusan STNK roda 2		11 unit	3,630,000			4,000,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Luwuk	6 Orang	72,000,000	APBD	-	72,000,000
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih		8 jenis	2,554,000			3,000,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	Luwuk	15 jenis	60,000,000	APBD	-	80,000,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/ Fotocopy	Luwuk	25000 Lembar	8,000,000	APBD	-	10,000,000
		Jumlah cetakan		... Buku				



	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Luwuk	7 jenis	5,720,000	APBD	-	6,500,000
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Luwuk	3 Media	3,300,000	APBD	-	4,000,000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan Jumlah minuman	Luwuk	1200 dos 1500 dos	48,000,000 18,000,000	APBD	-	50,000,000 22,800,000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	61 Orang	156,000,000	APBD	-	335,000,000
	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Dalam Daerah	61 Orang	259,394,547	APBD	-	405,000,000
	20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga honorer	Luwuk	16 Orang	369,200,000	APBD	-	405,827,000
02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik			722,650,000			1,422,400,000
	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	Luwuk	1 Unit 2 unit	440,000,000 50,000,000	APBD	-	532,400,000
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Luwuk	6 jenis	15,000,000	APBD		100,000,000
	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Luwuk	5 jenis	50,000,000	APBD		168,000,000
	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Luwuk	5 jenis	50,000,000	APBD	-	148,000,000
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Luwuk	3 jenis	50,000,000	APBD	-	185,000,000
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	Luwuk	3 unit 3 unit	36,000,000 3,000,000	APBD	-	48,000,000
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Luwuk	15 Unit	18,900,000	APBD	-	26,000,000
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Luwuk	20 unit	9,750,000	APBD	-	15,000,000
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Luwuk	1 unit		APBD		200,000,000



03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan disiplin aparatur			85,400,000			209,300,000
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Luwuk	55 pasang		APBD	106,000,000
	04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI	Luwuk	55 pasang		APBD	
	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Luwuk	61 Pasang	85,400,000	APBD	- 103,300,000
04	Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase ASN purna tugas yang terfasilitasi sesuai ketentuan			10,000,000			15,000,000
	01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai purna tugas	Luwuk	2 orang	10,000,000	APBD	15,000,000
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur			85,000,000			90,000,000
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat formal	Luwuk	10 orang	50,000,000	APBD	60,000,000
	04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah laporan kepegawaian Jumlah ASN yang dibina	Luwuk	3 laporan	35,000,000	APBD	- 30,000,000
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan			169,500,000			250,000,000
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Luwuk	1 laporan	17,500,000	APBD	- 30,000,000
	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Luwuk	2 laporan	20,000,000	APBD	- 30,000,000
	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Luwuk	1 laporan	24,500,000	APBD	- 30,000,000
	05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Luwuk	5 Dokumen	40,000,000	APBD	- 50,000,000



07	Penyusunan Dokumen RKBU perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKBU	Luwuk	1 Dokumen	17,500,000	APBD		35,000,000
09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Luwuk	3 laporan	Rp50,000,000	APBD	-	75,000,000
08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase program dan kegiatan dalam dokumen Renja terhadap Renstra OPD			66,000,000			85,000,000
02	Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD	Kab. Banggai	1 laporan	Rp66,000,000	APBD		85,000,000
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			547,534,000			1,294,733,000
01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perdesaan (Karang Taruna, PKK, LPMD, Lembaga Adat, Posyandu, RT, RW) yang mengikuti sosialisasi/pembinaan	Kab. Banggai	500 Lembaga	149,500,000	APBD	-	205,000,000
02	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Jumlah peserta Diklat	Kab. Banggai	50 Orang		APBD	-	242,703,000
04	Penyelenggaraan bimbingan teknis kader desa dan masyarakat desa	Jumlah peserta Bimtek Kader Desa dan Masyarakat Desa	Kab. Banggai	452 Orang	128,490,000	APBD	-	279,000,000
05	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah pelaksanaan BBGRM Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Kabupaten, Provinsi, Nasional	3 Kali	163,444,000	APBD	-	395,000,000
06	Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pamsimas	Kab. Banggai	390 orang	59,550,000	APBD		106,480,000



	07	Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PPSP	Kab. Banggai	390 orang	46,550,000	APBD		66,550,000
16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			138,353,000			300,272,000
	08	Fasilitasi pembentukan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan badan usaha milik desa dan badan usaha milik antar desa	Laporan evaluasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha milik Antar Desa	Kab. Banggai	1 Laporan	79,053,000	APBD	-	180,482,000
	09	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi produk hukum terkait dengan BUMdes, pasar desa/Lembaga ekonomi produktif perdesaan/Kawasan perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Permendes tentang BUMDes	Kab. Banggai	582 orang	59,300,000	APBD	-	119,790,000
18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD			868,259,000			2,089,675,000
	05	Peningkatan kapasitas melalui pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD	Jumlah peserta pembinaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Kab. Banggai	873 Orang	252,808,000	APBD	-	766,255,000
	06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan bagi Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Kab. Banggai	169 orang	169,858,000	APBD	-	380,000,000
	07	Penyusunan, penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Perda dan Perbup	Kab. Banggai	2 Perda dan Perbup				27,500,000



	08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa Berbasis Web	Jumlah laporan Realisasi APBDesa	Kab. Banggai	1 laporan	207,193,000	APBD	-	54,500,000
	09	Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	Jumlah Kecamatan yang dilakukan supervisi evaluasi APBDesa	Kab. Banggai	23 Kecamatan	94,200,000	APBD	-	220,000,000
	10	Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan APBDesa	Kab. Banggai	1 Dokumen	144,200,000	APBD	-	311,420,000
	11	Pemberian predikat pengelolaan keuangan desa terbaik	Jumlah desa yang memperoleh predikat pengelolaan keuangan desa terbaik	Kab. Banggai	1 desa		APBD		330,000,000
19		Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Peningkatan peran perempuan di perdesaan			1,123,118,125			1,126,330,000
	01	Jambore PKK	Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TP-PKK Kab. Banggai	Kab. Banggai	1 Laporan	318,939,700	APBD	-	446,750,000
	02	Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah PKK Kec. & PKK Kel. Yang diberikan dukungan dana operasional	Kab. Banggai	69 PKK Kec. Dan Kel.	208,500,000	APBD	-	300,000,000
	03	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan sistem informasi pokjanal Posyandu	Kab. Banggai	288 Orang	379,850,000	APBD	-	100,000,000
	04	Rakon PKK	Jumlah peserta yang mengikuti Rakon PKK	Kab. & Propinsi	350 orang	215,828,425	APBD	-	279,580,000
20		Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	Persentase Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global			294,924,000			405,808,000

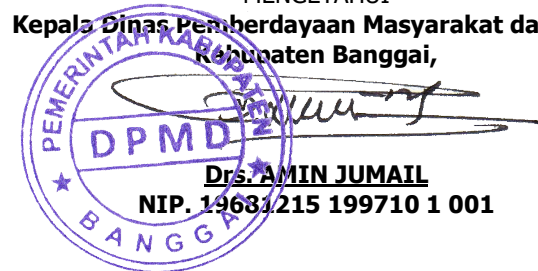


	01	Fasilitasi pembentukan, penetapan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Posyantek tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan pembentukan Posyantek	Kab. Banggai	8 kali	51,924,000	APBD		79,108,000
	02	Identifikasi, pembinaan, pemyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna berbasis masyarakat	Jumlah pelaksanaan Pameran Tekhnologi Tepat Guna	Propinsi dan Nasional	1 kali	243,000,000	APBD		326,700,000
21		Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa			143,000,000			52,050,000
	01	Identifikasi, fasilitasi, pembentukan, penetapan, pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Database Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Kab. Banggai	1 Dokumen	143,000,000	APBD		52,050,000
22		Program Penataan dan Perencanaan Desa	Persentase Penataan dan Perencanaan Desa			763,866,163			1,255,525,000
	01	Fasilitasi , Sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan desa	Jumlah Laporan rencana kerja Pemerintahan Desa di 291 desa	Kab. Banggai	1 laporan	88,119,500	APBD	-	232,000,000
	02	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa	Jumlah laporan penyelesaian dan penetapan tapal batas desa	Kab. Banggai	1 laporan	Rp31,320,625	APBD	-	45,525,000
	03	Identifikasi, fasilitasi, pembentukan dan pembinaan kerjasama antar desa	Jumlah dokumen identifikasi kerjasama antar desa	Kab. Banggai	1 Dokumen	Rp95,375,163	APBD	-	95,000,000
	04	Fasilitasi, pembinaan, pemutahiran, monitoring, evaluasi dan pelaporan data profil desa dan profil kelurahan	Jumlah laporan klasifikasi desa dan kelurahan di 291 desa dan 46 kelurahan	Kab. Banggai	1 laporan	Rp44,710,375	APBD		115,000,000



05	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan lomba desa di 23 desa dan 10 kelurahan serta mengikuti lomba desa dan kelurahan ditingkat Propinsi dan tingkat pusat	Kab. Banggai	1 laporan	Rp401,415,025	APBD	-	500,000,000
06	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah laporan instrumen pengungkap data kategori desa dan kelurahan	Kab. Banggai	1 laporan	65,825,475	APBD	-	160,000,000
07	Identifikasi, perencanaan, penetapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan pedesaan	Jumlah dokumen kawasan pedesaan	Kab. Banggai	1 Dokumen	37,100,000	APBD	-	108,000,000
TOTAL					6,129,502,835			10,103,220,000

MENGETAHUI
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai,



Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI**

PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	KETERANGAN
			APBN (Rp)		
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN			4,850,000,000		
BANTUAN PERMODALAN BUMDES	12	DESA	600,000,000	KAB. BANGGAI	
BANTUAN PENGEMBANGAN BUMDES	2	DESA	300,000,000	KAB. BANGGAI	
BANTUAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT (UEM)	5	DESA	1,000,000,000	KAB. BANGGAI	
PEMBANGUNAN EMBUNG	7	DESA	2,100,000,000	KAB. BANGGAI	
PEMBANGUNAN PASAR DESA	5	DESA	850,000,000	KAB. BANGGAI	

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BANGGAI



Drs. AMIN JUMAIL

NIP.19681215 199710 1 001

